

**PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA-SKPD) OLEH BIDANG ANGGARAN
DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

ANGGI FARADIANSYAH

NIM. 07011282126083

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA-SKPD) OLEH BIDANG ANGGARAN
DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh:

ANGGI FARADIANSYAH

NIM. 07011282126083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 03 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
(RKA-SKPD) OLEH BIDANG ANGGARAN DAERAH DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

ANGGI FARADIANSYAH

NIM. 07011282126083

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 17 Maret 2025**

Pembimbing :

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001

Tanda Tangan



Penguji :

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si

NIP. 198902222023212044



Mengetahui,

Dean FISIP UNSRI



Prof. Dr. Alfritri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Faradiansyah

NIM : 07011282126083

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 04 Maret 2025



Anggi Faradiansyah

NIM. 07011282126083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Untungnya, bumi masih berputar

Untungnya, ku tak pilih menyerah

Untungnya, ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan”

(Bernadya - Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan)

Dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Kholijah dan Ayah Nur Alamsyah
2. Saudari terkasih, Kakak Gita Fariansyah
3. Orang-orang yang saya sayangi
4. Sahabat-sahabat yang saya banggakan
5. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
6. Teman-teman seperjuangan, Administrasi Publik 2021
7. Almamater kuning kebanggaan, Universitas Sriwijaya
8. Diri saya sendiri.

ABSTRACT

This study aims to determine how coordination in the preparation of the Budget Work Plan (RKA-SKPD) by the Regional Budget Division at the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency. Coordinating the preparation of the Budget Work Plan (RKA-SKPD) is one of the functions carried out by the Regional Budget Division. This research was motivated by seeing problems in the implementation of such coordination, such as the lack of understanding of Human Resources (HR), not optimal communication, and use of the SIPD RI. This type of research is descriptive qualitative with reference to the concept of Coordination according to Hasibuan (2011). In this concept, there are four factors that influence the implementation of coordination, namely: Unity of action, Communication, Division of labor, and Discipline. Based on the results of the data analysis that has been carried out by the author, several suggestions can be given to improve coordination in the preparation of the RKA-SKPD by the Regional Budget Division, such as establishing a clearer division of labor structure, increasing HR competence, establishing sanctions and incentives, and developing budgeting applications.

Keywords: *Coordination, Preparation, RKA, SKPD.*

Advisor,

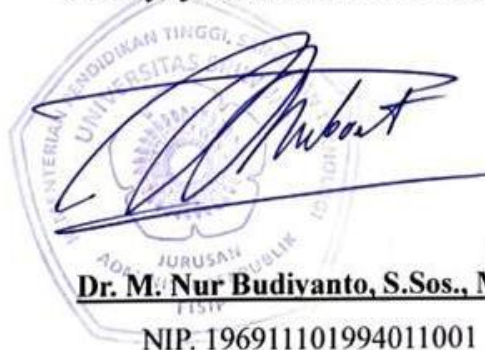
Dr. Lili Erina, M.Si.
NIP. 196612301992032001



Palembang, 19 March 2025

Chairman of The Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoordinasian dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Bidang Anggaran Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi dari melihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, seperti dari kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM), komunikasi, dan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengacu pada konsep Koordinasi menurut Hasibuan (2011). Dalam konsep tersebut, terdapat empat faktor yang memengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu: Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian kerja, dan Disiplin. Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diberikan beberapa saran untuk meningkatkan pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah, seperti penetapan struktur pembagian kerja yang lebih jelas, peningkatan kompetensi SDM, penetapan sanksi dan insentif, serta pengembangan aplikasi penganggaran.

Kata Kunci : Pengoordinasian, Penyusunan, RKA, SKPD

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si


NIP. 196612301992032001



Palembang, 19 Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang” ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir guna menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih dan rasa syukur juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Kholijah dan Ayah Nur Alamsyah. Terima kasih ibu dan ayah atas segala bentuk dukungan yang diberikan, kasih sayang yang tak terhingga, serta do'a yang tak pernah terputus yang selalu menyertai di sepanjang hidup penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada saudari kandung satu-satunya dari penulis, Kakak Gita Fariansyah yang juga senantiasa mendukung, membantu dan membersamai di berbagai keadaan. Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada Bibi dan Paman dari penulis, Nurbaiti dan Selamat yang dengan tulus selalu memberikan bantuan, dukungan, dan menyayangi penulis.

Dengan tulus, penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada semua pihak yang terlibat membantu dan memberikan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tulus kepada penulis.
6. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Ibu Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji pada Ujian skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP UNSRI yang telah banyak membantu dalam mengurus administrasi selama perkuliahan dan selama penelitian.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang selaku Instansi yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
11. Pegawai di Bidang Anggaran Daerah yang telah memberikan bantuan, ilmu, dan pengalaman bagi penulis selama penelitian.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, dan Kecamatan Kertapati Kota Palembang atas kesediaannya membantu dalam penelitian penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Dinda Afftita, Mitha Miranda, Suci Fitria Dewi, dan Adedia Paramadinanti yang senantiasa saling mendukung, memotivasi, dan mendoakan satu sama lain.
14. Teman-teman *Eightclusive*, yaitu Wulan, Difa, Anin, Fina, Cica, Salsa, Jo, Aldi, dan Arfan yang tetap menjaga komunikasi dari jarak jauh serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
15. Rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta setiap orang yang pernah penulis temui yang sempat memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi maupun selama perkuliahan.
16. Terakhir, teruntuk penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Anggi Faradiansyah. Terima kasih karena tidak pernah patah semangat dan senantiasa ikhlas dan berlapang dada menerima baik dan kurangnya, menjalani susah dan senang dalam perjalanan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentu belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi menghasilkan skripsi yang baik. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini juga dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi yang bermanfaat.

Palembang, 17 Maret 2025



Anggi Faradiansyah

NIM. 07011282126083

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengoordinasian	9
2.1.2 Faktor Pengoordinasian Menurut Hasibuan (2011)	13
2.1.3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD).....	15
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Definisi Konsep	28
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.4.1 Jenis Data	31
3.4.2 Sumber Data.....	32
3.5 Informan Penelitian	32

3.6	Teknik Pengumpulan Data	34
3.7	Teknik Analisis Data.....	35
3.8	Jadwal Penelitian	37
3.9	Sistematika Penulisan.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Gambaran Umum Instansi.....	39
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	41
4.3	Hasil Penelitian.....	43
4.3.1	Analisis Faktor Kesatuan Tindakan pada Pengoordinasian Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang.....	44
4.3.2	Analisis Faktor Komunikasi pada Pengoordinasian Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang	60
4.3.3	Analisis Faktor Pembagian Kerja pada Pengoordinasian Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang.....	84
4.3.4	Analisis Faktor Disiplin pada Pengoordinasian Penyusunan RKA-SKPD Oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang.....	96
4.4	Pembahasan	112
BAB V PENUTUP		124
5.1	Kesimpulan.....	124
5.2	Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA		127
Lampiran 1. Pedoman Wawancara		131
Lampiran 2. Pedoman Wawancara SKPD		145
Lampiran 3. Pedoman Observasi		146
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi.....		147
Lampiran 5. SK Skripsi.....		148
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....		150
Lampiran 7. Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....		151
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Seminar Proposal		152
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian		153
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....		154
Lampiran 11. Bukti Turnitin UNSRI		155

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian	37
Tabel 4. 1 Informan Penelitian.....	42
Tabel 4. 2. Daftar SKPD di Kota Palembang	76
Tabel 4. 3 Daftar Nama Ketua Tim di Bidang Anggaran Daerah	93
Tabel 4. 4 Matriks Temuan Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	27
Gambar 2. Model Analisis Data Miles dan Huberman	36
Gambar 3. Struktur Organisasi.....	41
Gambar 4. Verifikasi RKA-SKPD oleh Koordinator SKPD.....	47
Gambar 5. Ketentuan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	48
Gambar 6. Tujuan Verifikasi RKA-SKPD.....	48
Gambar 7. Pasal 9 Perwali Nomor 49 Tahun 2022	58
Gambar 8. Koordinasi antara Kepala Bidang Anggaran Daerah bersama	63
Gambar 9. Koordinasi Ketua Tim dan Pelaksana Kegiatan	64
Gambar 10. Pelaksanaan Briefing di Bidang Anggaran Daerah.....	66
Gambar 11. Pengumpulan Dokumen RKA oleh SKPD.....	67
Gambar 12. Tampilan Awal SIPD RI	73
Gambar 13. Tampilan Fitur SIPD RI Penganggaran	73
Gambar 14. Tampilan Sub Kegiatan Belanja pada SIPD RI.....	74
Gambar 15. Tampilan Dokumen RKA-SKPD pada SIPD RI.....	74
Gambar 16. Format Berita Acara.....	83
Gambar 17. Pelaksanaan Tugas Verifikasi RKA-SKPD	87
Gambar 18. Perbaikan Rancangan yang Belum Terverifikasi	87
Gambar 19. Rancangan yang Telah Terverifikasi.....	88
Gambar 20. Daftar Koordinator SKPD di Bidang Anggaran Daerah.....	94
Gambar 21. Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2024	99
Gambar 22. Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD	106
Gambar 23. Ketentuan Reviu RKA-SKPD oleh APIP	109
Gambar 24. Wawancara Bersama Informan I ₁	129
Gambar 25. Wawancara Bersama Informan I _{2-a}	129
Gambar 26. Wawancara Bersama Informan I _{2-b}	129
Gambar 27. Wawancara Bersama Informan I _{3-a}	129
Gambar 28. Wawancara Bersama Informan I _{3-b}	129
Gambar 29. Wawancara Bersama Informan I _{4-a}	129
Gambar 30. Wawancara Bersama Informan I _{4-b}	130
Gambar 31. Wawancara Bersama Informan I _{4-c}	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	131
Lampiran 2. Pedoman Wawancara SKPD	145
Lampiran 3. Pedoman Observasi	146
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi.....	147
Lampiran 5. SK Skripsi.....	148
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	150
Lampiran 7. Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....	151
Lampiran 8. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	152
Lampiran 9. Surat Izin Penelitian	153
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.....	154
Lampiran 11. Bukti Turnitin UNSRI	155

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwali	: Peraturan Walikota
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKA-SKPD	: Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Koordinasi menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2011:85) mendefinisikan bahwa koordinasi sebagai suatu usaha yang sinkron dan terarur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2011:85).

Koordinasi menurut Mooney dan Reily dalam Handayani (2002:88) menyebutkan bahwa: “*Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose*” (Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama) (Sudrajat, 2024). Dalam pelaksanaan koordinasi, menurut Hasibuan (2011) bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu: 1) kesatuan tindakan; 2) komunikasi; 3) pembagian kerja; 4) disiplin.

Berdasarkan penelitian dengan judul Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Kusdinar et al (2023), diperoleh bahwa dalam koordinasi internal dalam penyusunan RKPD pada bidang PPEPD ini sudah terlihat cukup baik terlihat dari aspek kesatuan tindakan dan aspek komunikasi. Faktor hambatan terdapat pada aspek struktural dalam perumusan tugas dan wewenang, fungsi dan jabatan.

Dalam penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru oleh Anita et al (2024). Dengan mengacu pada konsep koordinasi menurut Hasibuan (2011), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dalam penertiban gelandangan dan pengemis yang disebabkan kurangnya komunikasi, tidak adanya jadwal tetap, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang ketertiban sosial.

Pada penelitian lainnya yang membahas tentang koordinasi pernah dilakukan oleh Wiyanika (2021), dengan judul Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi pada BPKAD Kota Madiun). Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan yang berulang terjadi dalam setiap penyusunan perencanaan aset daerah, pemahaman yang kurang dari pegawai, dan belum tersedianya standar perencanaan aset, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaksanaannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang bertindak sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Palembang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Salah satu bidang yang menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Kota Palembang adalah Bidang Anggaran Daerah.

Mengenai tugas dan fungsi Bidang Anggaran Daerah dijelaskan dalam Pasal 9 Perwali Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2022. Bidang Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mana Kepala Bidang Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang Anggaran Daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud tersebut, Kepala Bidang Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- g. pengoordinasian kebijakan administrasi anggaran daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugasnya.

Berdasarkan penjabaran tugas dan fungsi diatas, terdapat salah satu fungsi yang dijalankan oleh Bidang Anggaran Daerah yaitu fungsi Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada fungsi tersebut, dapat dilihat bahwa Bidang Anggaran Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi (pengoordinasian).

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut mengatur tentang ketentuan terkait RKA-SKPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD juga diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut menjelaskan bahwa proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Adapun dalam penyusunan RKA-SKPD disusun dengan

menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada:

- a. Indikator kinerja;
- b. Tolak ukur kinerja;
- c. Sasaran kinerja;
- d. Analisis standar belanja;
- e. Standar harga satuan;
- f. RKBMD;
- g. Standar Pelayanan Minimal.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan RKA-SKPD ini adalah: 1. TAPD; 2. Wali Kota; 3. Kepala SKPD; dan 4. PPKD.

Sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penyusunan RKA-SKPD, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Manoppo et al., (2019) dengan judul Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa proses penyusunan APBD dalam RKA-SKPD BPPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Antonio (2022) dengan judul Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah melalui SIPD RI di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa penyusunan RKA OPD melalui SIPD RI di Kabupaten Poso sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dari waktu dan biaya penelitian.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Suripatty et al., (2024) dengan judul Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Kantor Distrik Sorong Monoi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan RKA-SKPD di Distrik Sorong Manoi sudah dilaksanakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku, namun dalam penyusunannya diharapkan dapat dilakukan tepat waktu, serta perlunya peningkatan kinerja keuangan bagi aparatur pemerintah agar pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi di BPKAD Kota Palembang, sebagaimana dikutip di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Palembang Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa pelaksanaan koordinasi sendiri memang masih menjadi kelemahan, baik itu koordinasi internal maupun eksternal yang mana dalam pelaksanaannya masih kurang baik. Selain itu, terbatasnya SDM, sarana prasarana, serta masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proporsional juga menjadi kendala yang berkaitan dengan koordinasi di BPKAD Kota Palembang.

Kemudian berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan pegawai Analis Keuangan Pusat dan Daerah di Bidang Anggaran Daerah, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau soal kendala sendiri itu dari segi kebijakannya, lalu respon dan pemahaman Sumber Daya Manusia, dan ketepatan waktu yang kurang. Terkadang juga masih terkendala pada pemanfaatan sistem atau aplikasi di penganggaran yaitu SIPD. Selain itu dari dana juga, karena di bidang anggaran daerah ini kan hanya menganggarkan, tapi belum tentu uangnya ada” (Hasil wawancara 20 Agustus 2024).

Jika melihat pada hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala pada proses pengoordinasian dalam penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah. Mengenai kebijakan, dalam pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD sendiri telah memiliki pedoman berupa peraturan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, permasalahan justru terletak pada komunikasi dengan Sumber Daya Manusia (SDM), ketepatan waktu dan penggunaan sistem informasinya. Kurangnya pemahaman terutama dari SKPD di Kota Palembang terhadap ketentuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Hal tersebut pula yang

menyebabkan tidak jarang terjadi keterlambatan bagi SKPD dalam penyampaian berkas RKA-SKPD kepada Bidang Anggaran Daerah, sehingga menjadi kendala dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan fungsi pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD. Belum optimalnya proses komunikasi dan kendala pada penggunaan aplikasi SIPD juga masih menjadi permasalahan dalam pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah.

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis rangkum diatas, dapat dilihat bahwa dalam proses pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah telah terdapat peraturan yang menjadi pedoman, namun masih didapatkan kendala seperti kurangnya pemahaman dari SDM di SKPD yang menghambat proses komunikasi dan ketepatan waktu, serta terjadinya kendala pada penggunaan SIPD. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.”

Adapun yang menjadi pedoman utama terkait pengoordinasian dalam Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengoordinasian dalam Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang?.”

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Pengoordinasian dalam Penyusunan RKA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang serupa.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi bagi BPKAD Kota Palembang terutama pada Bidang Anggaran Daerah dalam pengoordinasian penyusunan RKA-SKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., & Nurmasari, N. (2024). Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 442-462.
- Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 11-21.
- BPKAD Kota Palembang. (2023). *Renstra 2024-2026 (Rancangan Akhir)*.
- Faisol, F., Akbar, M., Maghfiroh, N. A., Watii, S., & Iswahyudi, A. P. (2023). Analysis of the Arrangement Mechanism of RKA-SKPD in Sampang Regency Focus on SKPD in Jrengik District. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 270-282.
- JDIH BPK RI. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025*.
- JDIH BPK RI. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- JDIH BPK RI. *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*.
- Kaiya, J. A. P. (2022). *Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Kusdinar, R., Rukmana, E., Yanti, I. Y. R., Fitria, M. D., & Supriyadi, T. A. (2023). Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Bappppeda Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 8(1), 1-6.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Ed. Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manoppo, E. S., & Walandouw, S. K. (2019). Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Rka-Skpd) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4). Doi: <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25432>.
- Nomainsi, F., Agustina, S., & Malinda, F. (2020). Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(1). Doi: <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1023>.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suripatty, R., Arce, B. P. S. Y. W., & Ferdinandus, Y. (2024). Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Di Kantor Distrik Sorong Manoi. *Peluang*, 18(1).
- Walikota Palembang. *Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Wiyatika, A. (2021). Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 261-272.